

Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Program Suku Anak Dalam Terobos Hutan Demi Pelayanan Aminduk (SAD To Happy) di Kabupaten Dharmasraya

Afra Yenggi Jonneddy

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email : afrayenggi01@gmail.com

Abstrack. *Community demands for excellent service require the government to innovate. Various services are carried out in an effort to meet the needs of the community. Documents and population administration services (aminduk) is one of the services provided and is the right of every resident of the country. There are no remote communities or Suku Anak Dalam (SAD) who live in the interior of the forest and far from residential areas. For this reason, the Population and Civil Registration Service (Disdukcapil) of Dharmasraya Regency, West Sumatra, took the initiative to carry out a ball pick-up service through the Tribe Children in Forest Breakthrough Program for Aminduk Services (SAD To Happy) which targets residents who experience obstacles in obtaining population administration services due to limitations. access and/or cultural barriers. This study uses qualitative methods with data collection techniques through interviews, observation and documentation of informant selection techniques through purposive sampling technique. The results of this study indicate that the Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil) of Dharmasraya Regency has innovated as a form to provide population administration services fairly and equitably to the entire community as indicated by the Suku Anak Dalam community in the Koto Besar area and Sembilan Koto District which still get basic services like society in general.*

Keyword : *Public Service, Innovation, Service, SAD To Happy*

Abstrak. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima mengharuskan pemerintah untuk melakukan inovasi. Berbagai pelayanan dilakukan dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dokumen dan layanan administrasi kependudukan (aminduk) merupakan salah satu dari layanan yang diberikan pemerintah dan merupakan hak setiap warga negara dimanapun berada. Tidak terkecuali masyarakat terpencil atau suku anak dalam (SAD) yang tinggal di pedalaman hutan dan jauh dari pemukiman penduduk. Untuk itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, berinisiatif melakukan layanan jemput bola melalui program Suku Anak Dalam Terobos Hutan Demi Pelayanan Aminduk (SAD To Happy) yang menasar pada penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh layanan administrasi kependudukan karena disebabkan keterbatasan akses dan/atau hambatan budaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi sedangkan teknik pemilihan informan melalui teknik *purposive sampling*. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Dharmasraya telah melakukan inovasi sebagai bentuk untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat dibuktikan dengan masyarakat Suku Anak Dalam di kawasan Koto Besar dan Kecamatan Sembilan Koto yang tetap mendapatkan pelayanan dasar seperti masyarakat pada umumnya.

Kata kunci : Pelayanan Publik, Inovasi, Pelayanan, SAD To Happy

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang berdampak pada penyebaran penduduk yang tidak merata. Faktor alami (geografis, sumber daya manusia, sumber daya alam) maupun faktor buatan (infrastruktur dan sumber daya sosial) yang tersebar tidak merata menyebabkan adanya ketimpangan yang menyebabkan adanya daerah tertinggal. Dimana daerah tertinggal merupakan kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional dan berpenduduk relatif tertinggal dari segi ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan (Djuwendah et al., 2013)

Adanya penyebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan kesulitan dalam memenuhi informasi kependudukan dan merumuskan suatu kebijakan, selain itu pelayanan yang diberikan kepada penduduk daerah tertinggal tidak terlaksana dengan bagaimana seharusnya. Untuk itu, pemerintah berupaya untuk melakukan kebijakan salah satunya dengan memberikan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah dapat memberikan peningkatan pelayanan publik pada bidang administrasi kependudukan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya.

Kebijakan otonomi dan desentralisasi harus dapat diimplementasikan dengan benar dan sesuai dengan target-target pembangunan baik daerah dan nasional. Oleh karena itu, sebagai daerah otonom, pemerintah daerah harus berkerja secara kreatif, inovatif dan berkelanjutan (sustainable), dalam merubah mental aparatur Negara dari sikap yang apatis terhadap perubahan sosial (Khoiron, 2017).

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik yang prima perlu dilakukan tidak hanya oleh pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah (pemda) sebagai bagian dari tanggung jawab untuk dapat memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.

Kewajiban pemda dalam mewujudkan pelayanan yang prima sebenarnya tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan Bab XXI UU Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa pemda dapat melakukan inovasi dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Hal ini diperkuat dengan adanya desentralisasi kewenangan yang dimiliki pemda sebagai konsekuensi otonomi daerah (Melinda et al., 2020).

Salah satu organisasi pemerintah yang dituntut maksimal dalam memberikan pelayanan kepada publik yaitu Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Dinas ini merupakan manajemen pemerintah yang harus ada dan tidak bisa dihilangkan . Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkandung makna pencatatan, penerbitan, penyimpanan serta pemeliharaan data kependudukan, dengan arti untuk pengelolaan urusan tata usaha dengan baik, sehingga dapat dilaksanakan langkah-langkah perbaikan pada saat yang tepat guna terpeliharanya arsip-arsip/dokumen penduduk secara komprehensif (Pernanda, 2022)

Terkait dengan bentuk kebijakan otonomi daerah serta pentingnya pelayanan publik dalam hal administrasi dan kependudukan pada seluruh masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Dharmasraya telah melakukan inovasi. Inovasi yang dilakukan berupa pelayanan jemput bola melalui program Suku Anak Dalam Terobos Hujan Demi Administrasi Kependudukan atau disingkat SAD To Happy. Layanan tersebut menasar pada penduduk yang tergolong rentan administrasi kependudukan yakni penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan keterbatasan akses dan/atau hambatan budaya. Lewat program Suku Anak Dalam Terobos Hutan Demi Administrasi Kependudukan atau disingkat SAD To Happy, Disdukcapil berupaya memberikan perlindungan dan pengakuan status pribadi dan status hukum bagi segenap warganya. Di mana, Kabupaten Dharmasraya didiami dua komunitas adat terpencil atau SAD,

yaitu SAD yang berada di kawasan Kecamatan Koto Besar, dan Kecamatan Sembilan Koto (Revolusional.go.id, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya yang melihat pada masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) yang berada di kawasan Kecamatan Koto Besar, dan Kecamatan Sembilan Koto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode penelitian deskriptif, karena penelitian ini ingin menjelaskan mengenai inovasi yang dilakukan oleh , Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Dharmasraya dalam upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan Aminduk. Teknik pemilihan informan adalah *purposive sampling* dimana adapun informan dalam penelitian ini adalah pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Dharmasraya, perangkat daerah yang bekerjasama dengan Disdukcapil, serta masyarakat yang menerima pelayanan. Kemudian, teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

KERANGKA TEORI

Pelayanan Publik

Pelayanan merupakan hal yang sering kita jumpai dalam kehidupan karena merupakan hal yang sudah menjadi hakikat dalam pemerintahan. Pelayanan diberikan oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk fungsi pemerintah yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Layanan yang diberikan pemerintah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara teoritis salah satu fungsi pemerintah dari beberapa fungsi utama pemerintah, seperti fungsi pembangunan (development function) dan fungsi perlindungan (protection function) (Salsabila et al.,2021).

Pelayanan publik tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia karena pada dasarnya manusia memerlukan pelayanan. Pelayanan publik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik masih menjadi satu fokus perubahan dimana pemerintah daerah baik kota maupun kabupaten diharuskan untuk fokus pada pembenahan dan melakukan inovasi pelayanan publik (Ariany & Putera, 2013).

Inovasi Pelayanan

Evert M. Roger menyatakan bahwa inovasi adalah ide, gagasan, praktik atau benda yang didasari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh individu atau kelompok untuk diadopsi (Alindro et al., 2021). Sedangkan menurut Muluk, inovasi pelayanan berasal dari gerakan pembaruan kualitas yang berkelanjutan dan mengarah pada gabungan perubahan organisasi, prosedur dan kebijakan yang dibutuhkan untuk berinovasi (Saputra Meddian et al., 2021).

Menurut Permen PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif original dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan artian inovasi bukan sesuatu penemuan yang baru melainkan dengan menata ulang kembali sistem kearah yang lebih baik (Rizki Ananda et al., 2019).

Inovasi pelayanan publik merupakan sebuah terobosan, pandangan mengenai inovasi pada sektor yang berhasil merupakan hasil kreasi dan implementasi proses, produk layanan, dan metode baru dan juga hasil dari pengembangan nyata dari efisiensi, efektivitas, dan kualitas hasil (Jalma et al., 2019).

Halvorsen dalam Suwarno (2008) menjelaskan bahwa inovasi dapat dikategorikan sebagai berikut :

a. Incremental innovations-radical innovations

Inovasi ini ditandai dengan tingkat perubahan yang terjadi, dalam sebuah perusahaan perbaikan inkremental yang dilakukan berupa perbaikan produk dan proses pelayanan yang sebelumnya sudah ada.

b. Top-down innovations-bottom-up innovations

Inovasi ini menjelaskan siapa yang memimpin proses perubahan perilaku dalam sebuah organisasi. Dimulai dari level Top yang berarti manajemen atau organisasi atau hirarkhi yang lebih tinggi, sedangkan bottom merujuk pada tingkat bawah organisasi, yang meliputi pekerja atau pegawai dalam pemerintah dan pengambil keputusan pada tingkat unit.

c. Needs-led innovations and efficiency-led innovation

Dalam hal ini inovasi apakah inovasi dianggap mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, atau inovasi yang dilakukan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan, prosedur dan produk yang sudah ada sebelumnya (Aranzi Eriza et al., 2020).

PEMBAHASAN

Program Suku Anak Dalam Terobos Hutan Demi Pelayanan Aminduk (SAD To Happy) di Kabupaten Dharmasraya

Pada dasarnya pemerintah dibentuk untuk memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan menjadi hal dasar yang harus didapatkan oleh tiap masyarakat tanpa terkecuali. Dalam memberikan pelayanan terhadap publik, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya dibeban waktu sudah melakukan beberapa inovasi dalam praktik pelayanan publik yang sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, menjalankan amanah dari salah satu dari 3 jenis Pelayanan Publik yang tertuang pada SK Menpan No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dalam SK Menpan No. 63 Tahun 2003 diuraikan bahwa ada tiga jenis pelayanan sebagai berikut (Pernanda, 2022) :

1. Pelayanan Administratif, yaitu pelayanan yang menyangkut berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bentuk pelayanan yang termasuk jenis ini misalnya pengurusan status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau pengusahaan suatu barang dalam bentuk dokumendokumen seperti KTP, Akte Pernikahan, Akte Kelahiran, BPKB, SIM, IMB, paspor, dsb.
2. Pelayanan Barang, yaitu pelayanan yang menyangkut penyediaan berbagai bentuk barang dan benda yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bentuk pelayanan yang termasuk dalam jenis ini misalnya pemasangan jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, instalasi air bersih, distribusi berbagai barang kebutuhan dasar, dsb.
3. Pelayanan Jasa, yaitu pelayanan yang menyangkut berbagai pemberian jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, layanan pos, dsb.

Terlepas dari inovasi yang sudah dilakukan, kenyataan Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan penyebaran wilayah menjadi tidak merata dan mengakibatkan adanya daerah tertinggal yang memiliki keterbatasan baik dalam bidang sosial, ekonomi dan pendidikan. Keterbatasan akan hal tersebut juga mempersulit masyarakat daerah tertinggal untuk mendapatkan pelayanan.

Suku Anak Dalam (SAD) merupakan suku minoritas yang hidupnya masih nomaden atau berpindah-pindah dari satu tempat ke dalam kawasan hutan di Pulau Sumatera (Menpan.go.id, 2020).

Namun seiring berkembangnya zaman, SAD sudah memiliki kesadaran untuk menetap pada suatu wilayah dan mendapatkan pendidikan seperti masyarakat pada umumnya. Hal tersebut menuntut pemerintah untuk memberikan pelayanan dan kebutuhan kepada masyarakat SAD seperti yang seharusnya didapatkan.

Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu daerah yang didiami oleh komunitas adat terpencil atau dikenal dengan SAD. Ada dua kelompok besar SAD di Sumatera Barat yaitu pada kawasan Kecamatan Koto Besar dan Nagari Banai Kecamatan IX Koto. Untuk itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Dharmasraya yang dibentuk pemerintah untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada tiap masyarakat daerah. Dalam upaya memberikan pelayanan kepada SAD yang ada di Kabupaten Dharmasraya, Disdukcapil berinisiatif menciptakan inovasi jemput bola dengan proaktif mendatangi kelompok rentan tersebut melalui program Suku Anak Dalam Terobos Hujan Demi Administrasi Kependudukan atau disingkat SAD To Happy.

Dalam berita khusus yang diterbitkan menpan.go.id dijelaskan bahwa Inovasi tersebut mempermudah SAD memperoleh Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil tanpa perlu pergi ke pusat kota. Pelaksanaan SAD to Happy dilakukan dengan cara pendekatan persuasif dan partisipatif untuk mewujudkan pelayanan inklusif. Dengan berkomitmen bersama kepala wilayah setempat dibangun melalui sosialisasi dan imbauan serta melakukan koordinasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan aktivis yang peduli SAD. LSM dan aktivis menginformasikan dan menjelaskan pentingnya dokumen kependudukan kepada SAD, kemudian dimulai perekaman data kependudukan terhadap SAD. disebutkan bahwa dari 77 orang, sudah 22 orang yang punya KTP, 13 orang yang mengurus kartu keluarga, tiga orang memiliki kartu identitas anak (KIA), dan tiga orang punya akta kelahiran.

Layanan jemput bola tersebut fokus kepada masyarakat SAD yang rentan administrasi kependudukan, yang memiliki hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan keterbatasan akses atau hambatan budaya. Layanan SAD to Happy berupaya memberikan perlindungan dan pengakuan status pribadi dan status hukum bagi setiap warganya. Dokumen kependudukan yang dimiliki oleh SAD juga akan memudahkan mereka dalam melakukan urusan dan meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik. Akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) yang dimiliki anak-anak SAD akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik.

Sebelum adanya inovasi SAD to Happy, pendataan pada masyarakat SAD sulit dilakukan yang membuat pemberian pelayanan dan pemberian jaminan sosial serta pendidikan menjadi terhambat. Bupati Kabupaten Dharmasraya, Sutan Riska menyatakan bahwa program SAD to Happy akan terus berkelanjutan karena mendukung program pemerintah dalam mengatasi permasalahan sosial seperti pelayanan kependudukan serta bantuan-bantuan yang akan diberikan. Hal ini menjelaskan bahwa program SAD To Happy berjalan dengan baik dan dapat bermanfaat bagi masyarakat kelompok SAD yang memiliki hambatan dalam mendapatkan pelayanan.

SIMPULAN

Pelayanan merupakan hal yang sering kita jumpai dalam kehidupan karena merupakan hal yang sudah menjadi hakikat dalam pemerintahan. Pelayanan diberikan oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk fungsi pemerintah yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Layanan yang diberikan pemerintah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah dituntut untuk melakukan inovasi dalam pelayanan publik, dimana Inovasi pelayanan publik merupakan sebuah terobosan, pandangan mengenai inovasi pada sektor yang berhasil merupakan hasil kreasi dan implementasi proses, produk layanan, dan metode baru dan juga hasil dari pengembangan nyata dari efisiensi, efektivitas, dan kualitas hasil.

Salah satu organisasi pemerintah yang dituntut maksimal dalam memberikan pelayanan kepada publik yaitu Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Namun kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan tidak meratanya penyebaran pelayanan dan muncul kesenjangan pada daerah tertinggal. Suku Anak Dalam (SAD) merupakan kelompok minoritas yang memiliki keterbatasan dan hambatan baik dalam hal sosial, budaya maupun pendidikan.

Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu kabupaten yang didiami oleh SAD yaitu pada Kecamatan Koto Besar dan Nagari Banai Kecamatan IX Koto. Untuk itu Disdukcapil Kabupaten Dharmasraya melakukan inovasi jemput bola melalui program Suku Anak Dalam Terobos Hujan Demi Administrasi Kependudukan atau disingkat SAD To Happy. Dimana disdukcapil memfokuskan layanan pada masyarakat SAD yang rentan administrasi kependudukan. Layanan SAD to Happy berupaya memberikan perlindungan dan pengakuan status pribadi dan status hukum bagi setiap warganya. Dokumen kependudukan yang dimiliki oleh SAD juga akan memudahkan mereka dalam melakukan urusan dan meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik. Akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) yang dimiliki anak-anak SAD akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik.

Sebelum adanya inovasi SAD to Happy, pendataan pada masyarakat SAD sulit dilakukan yang membuat pemberian pelayanan dan pemberian jaminan sosial serta pendidikan menjadi terhambat. Bupati Kabupaten Dharmasraya, Sutan Riska menyatakan bahwa program SAD to Happy akan terus berkelanjutan karena mendukung program pemerintah dalam mengatasi permasalahan sosial seperti pelayanan kependudukan serta bantuan-bantuan yang akan diberikan. Hal ini menjelaskan bahwa program SAD To Happy berjalan dengan baik dan dapat bermanfaat bagi masyarakat kelompok SAD yang memiliki hambatan dalam mendapatkan pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alindro, N., Putera, R. E., Publik, A., Andalas, U., & Padang, K. (2021). *Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman dapat direalisasikan di Indonesia , efektifitas pelayanan publik terutama kependudukan yang paling penting adalah Kartu Tanda Pendud.* 9(1), 218–227. <https://jurnal.asian.or.id/index.php/JIANA/article/download/51/42/>
- Aranzi Eriza, Yoserizal, E. P. R. (2020). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android “Paga Nagari” Polres Solok Kota. *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik*, 3(7), 5–24. <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JMPKP/article/download/1229/1434>
- Ariany, R., & Putera, R. E. (2013). Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 29(1), 33. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v29i1.364>
- Djuwendah, E., Hapsari, H., Renaldy, E., & Saidah, Z. (2013). Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal Di Kabupaten Garut. *Sosiohumaniora*, 15(2), 167. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v15i2.5744>
- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.24-37.2019>
- Khoiron. (2017). Pelayanan Publik Dan Keadilan Sosial. *PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 110265(April), 110493. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp/article/download/1418/906>
- Melinda, M., Syamsurizaldi, S., & Kabullah, M. I. (2020). Innovation of Online Population Administrative Services (PADUKO) by The Department of Population and Civil Registration of Padang Panjang City. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 202–216. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.115>
- Menpan.go.id. (2020). *Sejahterakan Hidup Suku Anak Dalam dengan SAD To Happy*. Menpan.Go.Id. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/sejahterakan-hidup-suku-anak-dalam-dengan-sad-to-happy>
- Pernanda, F. I. (2022). Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya. *Jurnal Niara*, 15(1), 47–53. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/nia/article/download/8297/3708/>
- Revolusimental.go.id. (2021). *SAD to Happy: Layanan Jemput Bola Administrasi Kependudukan Bagi Anak Suku Dalam*. Revolusimental.Go.Id. <https://revolusimental.go.id/kabar-revolusi-mental/detail-berita-dan-artikel?url=sad-to-happy-layanan-jemput-bola-administrasi-kependudukan-bagi-anak-suku-dalam>
- Rizki Ananda, B., Ekha Putera, R., & Ariany, R. (2019). Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Di Polres Solok Kota. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(2), 217–223. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v2i2.662>
- Saputra Meddian, Syamsurizaldi, D. A. (2021). Inovasi Pelayanan Program Kelurahan Siaga Sehat Jiwa (RASA SEJIWA) di Puskesmas Nanggalo Kota Padang. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 3(2). <https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jpp/article/download/3979/3383>

Shellya, Salsabila, Aidinil Zetra, R. E. P. (2021). Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Ktp Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(2), 314–324. <http://scholar.unand.ac.id/79866/>